

**DAMPAK KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA
MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA D.I. YOGYAKARTA**
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta Tahun 2003-2014)

Ana Sri Widayati

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

This study aims to determine the impact of the financial performance of capital expenditure and economic growth in the local government district/city D.I. Yogyakarta in 2003-2014. This research is a descriptive research. The population of this research is the local government in the district and city D.I. Yogyakarta in 2003-2014. Sampling technique using census method, which uses the entire population in the study. Analysis technique is using multiple regression analysis. The results of this study indicate that financial ratios based on local independence, financial dependence, and the effectiveness of the PAD does not affect the allocation of capital expenditures. Capital expenditure has significantly positive effect on economic growth. Capital expenditure is not mediate the relationship between financial performance based on financial dependence and independence of the region to economic growth. While capital expenditure mediates the relationship between the effectiveness of PAD by economic growth with a negative direction.

Keywords: financial performance, local independence, financial dependence, effectiveness of local revenue (PAD), capital expenditure, and economic growth.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berkeinginan untuk memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kebutuhan rakyat. Kemudian undang-undang tersebut diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan dijadikan sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah. Merujuk pada firman Allah, Surah An-Nisa 58 yang bermakna bahwa Allah menyuruh umat manusia untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh manusia agar adil dalam menetapkan hukum

atau kebijakan. Dalam hal ini pemerintah daerah adalah sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan ayat tersebut pemerintah diharapkan dapat bertindak jujur, adil, akuntabel, dan transparan di dalam melaksanakan amanat dari masyarakat. Provinsi D.I. Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang telah menerapkan otonomi daerah dengan prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun pada kenyataannya, berdasarkan informasi dari BPS DIY menyatakan bahwa pemerintah daerah Provinsi D.I. Yogyakarta periode 2006-2013 menunjukkan kinerja yang kurang baik. Tingkat PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta tumbuh pada laju 4,78 persen per tahun. Level tersebut masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka 5,9 persen. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan adanya dampak kinerja berdasarkan kemandirian daerah, ketergantungan keuangan, dan efektivitas PAD terhadap alokasi belanja modal, dampak alokasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, dan hubungan kinerja keuangan dengan pertumbuhan ekonomi yang dimediasi oleh alokasi belanja modal.

Teori Agensi

Teori agensi dikemukakan oleh Anthony dan Govindarajan (1995) sebagai hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* (dalam hal ini legislatif) mendelegasikan tanggung jawabnya termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan kepada *agent* (yang dalam hal ini adalah publik) untuk

melakukan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan adalah suatu pengukur kinerja dengan indikator keuangan (Sularso dan Restianto, 2011).

Rasio Kemandirian

Menurut Halim (2007), kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan dari sumber PAD.

Ketergantungan Keuangan

Ketergantungan keuangan pemerintah daerah ditunjukkan dengan seberapa besar transfer pusat terhadap total keseluruhan pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini membuktikan bahwa semakin besar daerah bergantung pada pusat (Sularso dan Restianto, 2011).

Rasio Efektivitas

Menurut Sularso dan Restianto (2011), rasio efektivitas menggambarkan realisasi penerimaan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target penerimaan PAD yang dianggarkan berdasarkan potensi dari daerah.

Alokasi Belanja Modal

Menurut Halim (2007), pengertian belanja modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka pembentukan modal atau penambahan aset/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal

dikategorikan ke dalam lima kategori utama, yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja modal fisik lainnya (Halim, 2007).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita yang secara terus menerus dalam jangka panjang dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di dalam suatu daerah.

Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Kemandirian pemerintah daerah terlihat dari seberapa besar tingkat penerimaan PAD dibanding penerimaan dari pusat atau dana perimbangan. Semakin tinggi angka rasio kemandirian keuangan ini maka dapat dikatakan bahwa kemampuan daerah dalam mengumpulkan PAD juga akan relatif tinggi. Terlihat bahwa kemandirian keuangan yang baik tercermin dari kinerja pemerintah dalam menggali potensi yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan kemandirian masyarakat dan dapat melimpahkan hasil perekonomian yang berdampak pada peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Dengan penerimaan daerah dari PAD yang mencukupi, maka dana yang dialokasikan untuk alokasi belanja modal akan semakin baik. Sularso dan Restianto (2011), menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

Pengaruh Ketergantungan Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal

Penerimaan pendapatan daerah dapat berupa dana perimbangan yaitu dana transfer dari pusat yang dijadikan insentif dalam penerimaan daerah. Dana transfer yang semakin menurun dapat dikatakan bahwa daerah semakin mandiri sehingga dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih besar. Hasil penelitian Sularso dan Restianto (2011), menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan dalam kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Ketergantungan keuangan berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.

Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Alokasi Belanja Modal

Salah satu sumber pendapatan daerah dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004, adalah PAD yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Kemampuan daerah untuk menerapkan sistem desentralisasi adalah ketika daerah tersebut memperoleh PAD sesuai target yang dianggarkan. Untuk meningkatkan pelayanan publik, melalui penerimaan PAD diharapkan dapat disalurkan pada investasi dan pemeliharaan infrastruktur daerah. Penelitian Arsa dan Setiawina (2015), menyatakan bahwa efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Hidayat (2013) efektivitas PAD berpengaruh signifikan pada

alokasi belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

Pengaruh Alokasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan, penambahan, dan pengelolaan aset atau inventaris daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Masyarakat melakukan aktivitas ekonomi dengan lancar apabila mendapat infrastruktur dan pelayanan umum yang memadai dari pemerintah. Penelitian Hidayat (2013) menyatakan bahwa alokasi belanja modal secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang dimediasi oleh Alokasi Belanja Modal

Rasio kemandirian daerah akan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah. Rasio kemandirian juga menggambarkan seberapa peduli masyarakat dalam pembangunan daerah (Suwandi dan Tahar, 2015). Semakin tinggi kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dan akan tersedia dana untuk alokasi belanja modal.

Dengan direalisasikan alokasi belanja modal tingkat pembangunan daerah akan naik dan pertumbuhan ekonomi juga semakin membaik. Martini dan Dwirandra (2015), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemandirian daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tingginya angka dana perimbangan pada laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa daerah bergantung terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ketergantungan artinya daerah semakin bergantung pada pemerintah pusat begitu juga sebaliknya. Jika dana perimbangan meningkat akan berpengaruh terhadap jumlah pendapatan daerah, sehingga akan berpengaruh pula terhadap pengalokasian belanja modal. Menurut Suwandi dan Tahar (2015), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alokasi belanja modal memediasi pengaruh kinerja keuangan berdasarkan ketergantungan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio efektivitas menggambarkan tingkat keberhasilan daerah dalam mencapai pendapatan PAD atau bahkan lebih dari anggaran yang telah direncanakan. Dengan terpenuhinya pendapatan asli daerah maka akan semakin baik untuk pemenuhan belanja daerah dan akan mampu memperbaiki tingkat pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian Arsa dan Setiawina (2015) yaitu tiga dari pengukuran kinerja keuangan derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, dan efektivitas PAD memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal. Secara umum alokasi belanja modal memperkuat hubungan antara kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi (Sukarmi dan Budiasih, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H₅: Alokasi belanja modal memediasi hubungan antara kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

H₆: Alokasi belanja modal memediasi hubungan antara ketergantungan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

H₇: Alokasi belanja modal memediasi hubungan antara kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian dampak kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi adalah laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi D.I. Yogyakarta yang berjumlah 1 kota dan 4 kabupaten yang terdiri dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian ini memiliki objek penelitian dengan rentang waktu selama 12 tahun yaitu pada tahun 2003-2014.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dan dikumpulkan dari hasil yang dipublikasikan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah berupa laporan realisasi anggaran dan dari Badan Pusat Statistik (BPS) berupa data mengenai PDRB.

Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sensus. Metode sensus adalah mengambil seluruh populasi dalam penelitian, yaitu seluruh kabupaten/kota Provinsi D.I. Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan data berupa laporan realisasi anggaran sebagai dasar dalam perhitungan rasio kinerja keuangan dan data PDRB sebagai informasi mengenai laju pertumbuhan ekonomi.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian adalah kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber penerimaan pendapatan daerah. Menurut Halim (2007), rasio kemandirian dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Ketergantungan Keuangan

Ketergantungan keuangan menunjukkan transfer dari pusat terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi ketergantungan keuangan maka semakin tinggi pula ketergantungan daerah kepada pusat dalam memenuhi pendapatan daerah. Menurut Sularso dan Restianto (2011), ketergantungan keuangan dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Ketergantungan Keuangan} = \frac{\text{Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Menurut Halim (2007), rasio efektivitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Alokasi Belanja Modal

Halim (2007) menyatakan bahwa belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan maupun untuk pemberian fasilitas kepada publik. Indikator alokasi belanja modal menurut Sularso dan Restianto (2011) diukur dengan rumus:

$$\text{Alokasi Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja dalam APBD}} \times 100\%$$

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah, makin tingginya pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut (Sukirno, 2011). Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diproksi dengan PDRB per kapita, yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memeriksa agar tidak terdapat pelanggaran asumsi klasik terhadap model regresi. Pelanggaran klasik akan menyebabkan koefisien-koefisien regresi yang memiliki standar error yang besar sehingga mengurangi kehandalan estimasi parameter dan menyebabkan hasil statistik tidak akurat. Pengujian ini dilakukan dalam beberapa analisis yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji t

Uji hipotesis menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat pada hasil regresi yang dilakukan dengan program regresi linear, yaitu dengan membandingkan tingkat masing-masing variabel bebas dengan $\alpha = 0,05$. Pengujian intervening dalam penelitian ini dapat diterima apabila hasil pengujian signifikan $< 0,05$. Rumus persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ABM = \beta_2 KD - \beta_2 KK + \beta_2 EPAD + \varepsilon$$

$$PT = \beta_1 KD - \beta_1 KK + \beta_1 EPAD + \beta_3 BM + \varepsilon$$

Dimana :

ABM = Alokasi Belanja Modal

KD = Kemandirian Daerah

KK = Ketergantungan Keuangan

EPAD = Efektivitas PAD

PE = Pertumbuhan Ekonomi

ε = error term

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil uji asumsi klasik.

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Pengujian ini menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran asumsi klasik yang ditemukan sehingga data dinyatakan layak untuk dilakukan pengujian hipotesis.

Hasil Uji t

Tabel 1
Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,051	3,614		,844	,402
KD	-,171	,119	-,335	-1,443	,155
KK	-,557	,515	-,274	-1,082	,284
EPAD	,498	,377	,200	1,320	,192

a. Dependent Variable: ABM
S

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diartikan bahwa variabel kemandirian daerah berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal dengan nilai koefisien Beta sebesar -0,335, artinya setiap pertambahan 1% variabel kemandirian daerah akan menurunkan alokasi belanja modal sebesar -0,335. Variabel ketergantungan

keuangan berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal dengan nilai koefisien sebesar -0,274, artinya setiap penambahan 1% variabel ketergantungan keuangan akan menurunkan alokasi belanja modal sebesar -0,274. Variabel efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal dengan nilai koefisien sebesar 0,200, artinya setiap pertumbuhan 1% variabel efektivitas PAD akan menaikkan alokasi belanja modal sebesar 0,200.

Tabel 2

Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	26,231	14,088		1,862	,068
KD	-,088	,090	-,258	-,985	,329
KK	-,088	,116	-,223	-,761	,450
EPAD	-,095	,041	-,345	-2,325	,024
ABM	,428	,130	,394	3,300	,002

a. Dependent Variable: PE

Sumber: Output SPSS

Dari tabel 2 diatas menunjukkan bahwa variabel alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien beta sebesar 0,394 yang artinya bahwa setiap penambahan 1% variabel alokasi belanja modal akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,394. Variabel kemandirian daerah yang dimediasi oleh alokasi belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien sebesar -0,652 (-0,258KD + 0,394ABM), artinya setiap penambahan 1% variabel kemandirian daerah akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,652. Variabel ketergantungan keuangan yang dimediasi oleh alokasi belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien -0,617 (-0,223KK + 0,394ABM),

artinya setiap pertambahan 1% variabel ketergantungan keuangan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,617. Variabel efektivitas PAD yang dimediasi oleh alokasi belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien -0,739 ($0,345EPAD + 0,394ABM$), artinya setiap pertumbuhan 1% variabel efektivitas PAD akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,739.

Halim (2007) menyatakan bahwa kemandirian daerah adalah sejauh mana pemerintah mampu membiayai sendiri kebutuhan pemerintahannya. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta dalam pemenuhan PAD masih kalah besar jumlahnya jika dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat. Artinya pemerintah daerah belum bisa mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Penelitian ini mengindikasikan bahwa penggalan potensi-potensi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dapat dikatakan belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari penetapan target PAD yang terbilang masih kecil, jika dibandingkan dengan dana perimbangan. Tingkat kemandirian yang rendah tersebut kurang berpengaruh terhadap pegalokasian belanja modal. Hasil temuan pada penelitian ini berhasil mendukung penelitian dari Arsa dan Setiawina (2015), yang menyatakan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja. Sekaligus menolak penelitian dari Sularso dan Restianto (2011), yang menyatakan bahwa kemandirian daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Sularso dan Restianto (2011) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan menunjukkan pemerintah daerah semakin bergantung terhadap

bantuan dari pusat sehingga daerah tidak mandiri. Sebagai konsekuensi adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah leluasa dalam menggunakan dana transfer yang dapat dikatakan pemberiannya cukup signifikan. Tingginya tingkat pendanaan dana perimbangan menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Namun dengan transfer yang tinggi tersebut tidak diimbangi dengan naiknya alokasi belanja modal pemerintah daerah di kabupaten/kota D.I. Yogyakarta karena belanja daerah alokasi terbesarnya adalah untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian Gerungan (2015) yang menyatakan bahwa ketergantungan keuangan tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Menurut Nugroho (2010) peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Namun pada penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Kondisi ini bisa disebabkan karena tuntutan dan kebutuhan masyarakat cenderung diabaikan, sehingga pengalokasian belanja modal tidak terealisasi dengan efektif (Martini dan Dwirandra, 2015). Proporsi belanja modal masih kalah dengan belanja pegawai dan barang dan jasa. Hasil temuan ini berhasil mendukung penelitian Martini dan Dwirandra (2015), yang menyatakan bahwa efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Alokasi belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki arti bahwa dalam penelitian ini porsi belanja modal

dipergunakan dengan semestinya untuk membangun sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran. Kuncoro (2004) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur daerah akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Suwandi dan Tahar (2015), yang menyatakan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Arsa dan Setiawina (2015), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh signifikan positif pada pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil penelitian ini kemandirian daerah masih tergolong rendah, namun sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya walaupun tidak signifikan. Karena pemerintah daerah tingkat kemandiriannya masih rendah, dana untuk pemenuhan alokasi belanja modal bergantung dari transfer pemerintah pusat. Alokasi belanja modal di kabupaten/kota D.I. Yogyakarta tahun 2003-2014 mengalami peningkatan dan penurunan yang drastis, sehingga nilai PDRB juga mengalami fluktuasi yang cukup berarti. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sukarmi dan Budiasih (2016), yang menyatakan bahwa alokasi belanja modal tidak memediasi pengaruh antara kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Alokasi belanja modal tidak memediasi hubungan ketergantungan keuangan dengan pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dimungkinkan karena penggunaan dana perimbangan dalam alokasi belanja modal masih relatif kecil, sebagian besar dana perimbangan masih digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Padahal faktor penting untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi adalah alokasi belanja modal. Hasil temuan ini sesuai dengan penelitian dari Prihastuti (2015), alokasi belanja modal tidak memediasi hubungan antara ketergantungan keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menolak hasil temuan Sularso dan Restianto (2011), yang menyatakan bahwa alokasi belanja modal memediasi pengaruh ketergantungan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Alokasi belanja modal memediasi hubungan antara efektivitas PAD dan pertumbuhan ekonomi dengan arah negatif. Abdullah dan Halim (2006) menyatakan bahwa pendapatan sendiri (PAD) tidak berasosiasi positif terhadap alokasi belanja modal. Argumen dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa secara teoritis pendapatan sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik. Namun untuk kasus ini presentase PAD pemerintah daerah di kabupaten/kota D.I. Yogyakarta hanya sebesar 12% dari total penerimaan daerah. Jumlah tersebut tergolong rendah jika digunakan untuk pengalokasian belanja modal. Sehingga peningkatan belanja modal pada penelitian ini bukan berasal dari dana PAD. Hasil temuan ini didukung oleh penelitian Abdullah dan Halim (2006) yang menyatakan bahwa efektivitas PAD tidak berasosiasi positif terhadap alokasi belanja modal untuk pelayanan publik.

PENUTUP

Simpulan

Hasil menunjukkan secara empiris bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Alokasi belanja modal berpengaruh

positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja modal tidak memediasi variabel kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan rasio kemandirian daerah dan ketergantungan keuangan. Sedangkan alokasi belanja modal memediasi hubungan antara efektivitas PAD dengan pertumbuhan ekonomi dengan arah negatif.

Keterbatasan

Adapun keterbatasan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian ini hasilnya banyak yang menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Hal tersebut artinya bahwa populasi tidak dapat digeneralisasikan/diberlakukan untuk umum. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran dari tahun 2003-2014. Jika hanya menggunakan informasi data saja kurang menggambarkan bagaimana kondisi riil kinerja keuangan di pemerintah daerah.

Saran

Bedasarkan keterbatasan-keterbatasan tersebut saran untuk penelitian yang berkelanjutan adalah menambahkan tahun penelitian dan memperluas populasi dengan memilih kabupaten dan kota yang ada di Indonesia atau menggunakan seluruh kabupaten di Indonesia sehingga dapat digeneralisasi. Untuk pertimbangan penelitian selanjutnya dapat menambahkan metode obeservasi atau kuesioner sehingga dapat menanyakan secara langsung bagaimana kendala ataupun masalah-masalah yang dihadapi dalam mengoptimalisasi kinerja keuangan pemerintah daerah agar mencapai kinerja yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Halim, A. 2006. "Studi atas belanja modal pada anggaran pemerintah daerah dalam hubungannya dengan belanja pemeliharaan dan sumber pendapatan." *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(2), 17-32.
- Alfatih, Pustaka. 2009. Al-quran dan Terjemah; QS An-Nisa ayat 58. Pustaka Alfatih.
- Anthony, R.N. dan V.Govindarajan. 1995. *Management Control System. Eight Edition International Student Edition*. Richard D. Irwin Inc. U.S.A.
- Ardhini, A., & Handayani, S. 2011. "Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah)." *Doctoral dissertation*. Universitas Diponegoro.
- Arsa, I.K. dan Setiawina, N.D. 2015. "Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Bali Tahun 2006 s.d. 2013." *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 20 104 No. 2.
- BPS. 2013. Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB ADHK 2000. Diakses pada tanggal 15 April 2016 melalui <http://BadanPusatStatistik.go.id/>
- Bose, N., Haque, M. E., & Osborn, D. R. 2007. "Public expenditure and economic growth: a disaggregated analysis for developing countries." *The Manchester School*, 75(5), 533-556.
- Gerungan, S. F., Saerang, D. P. E., & Pontoh, W. 2015. "Pengaruh Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 6(1).
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Kuncoro, Haryo. 2004. Pengaruh Transfer antar Pemerintah Pada Kinerja Fiscal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. Vol.9 no.1
- Martini, K., & Dwirandra, A. A. N. B. 2015. "Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Alokasi Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali." *E-Jurnal Akuntansi*, 10(2), 426-443.
- Nugroho, Fajar dan Rohman, Abdul. 2012. "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Tengah)." Universitas Dipenogoro, Semarang.
- Prihastuti, A.H., Taufik, T. dan Agusti, R. 2016. "Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau." *Jurnal Sorot*, 10(2), pp.143-154.
- Sukarmi, N.W., & Budiasih, I. 2016. "Alokasi Belanja Modal Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(03).
- Sukirno, S. 2011. *Makro Ekonomi; Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sularso, H., dan Restianto, Y. 2011. "Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah." *Media Riset Akuntansi*, Vol. 1 No. 2 Agustus 2011.
- Suwandi dan Tahar, A. 2015. "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta)." *Jurnal InFestasi*, Vol. 11, No.2.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Utomo, S.P. 2012. "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Pemeditasi." *Skripsi*. Universitas Sebelah Maret, Surakarta.

Wong, J. D. 2004. "The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity." *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Fall, 16.3.